Research Review
Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol. 3, No. 1, Juni 2024 ISSN: 29622743

Demokratisasi dan Media Massa di Indonesia
(Democratization and Media in Indonesia)

Melati[1], Muhammad Nurdin[2], Viola Augustia Putri [3]
[1,2,3] Ilmu Administrasi Negara, Universitas Maritim Raja Ali Haji
melatisjk@gmail.com[1], mnurdin@student.umrah.ac.id [2] , vaugustiaputri@student.umrah.ac.id [3]

Article Info

Article history:

Received: 18 Juni 2024
Revised: 29 Juni 2024
Accepted: 30 Juni 2024

Keywords:

Democratization,
Empirical data,
Mass media

Kata Kunci:

Demokratisasi,
Data Empiris,
Media massa

Abstract

This research analyzes the role of mass media in the democratization process in Indonesia after the fall of the New Order in 1998. Using a literature study method, this research evaluates the role of mass media in disseminating information, facilitating public dialogue, and strengthening government accountability. Political reforms have allowed the media to report important issues more freely, contributing to government transparency and accountability. The mass media also serves as a platform for public discussion, helping the public understand national issues and become more critical voters. However, the mass media faces significant challenges, including intense competition among media channels, dependence on political and economic interests, and the risk of information manipulation. The research results show that despite these challenges, the mass media remains a vital element in promoting democratization in Indonesia by increasing public participation and political transparency. Steps to strengthen media integrity and professionalism, as well as media education for the public, are essential to ensure that the mass media can continue to play a role as a pillar of a healthy and sustainable democracy.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis peran media massa dalam proses demokratisasi di Indonesia pasca jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998. Menggunakan metode studi literatur, penelitian ini mengevaluasi peran media massa dalam menyampaikan informasi, memfasilitasi dialog publik, dan memperkuat akuntabilitas pemerintah. Reformasi politik telah memungkinkan media melaporkan isu-isu penting dengan lebih bebas, yang berkontribusi pada transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Media massa juga berfungsi sebagai platform untuk diskusi publik, membantu masyarakat memahami isu-isu nasional dan menjadi pemilih yang lebih kritis. Namun, media massa menghadapi tantangan signifikan, termasuk persaingan ketat antar saluran media, ketergantungan pada kepentingan politik dan ekonomi, serta risiko manipulasi informasi. Hasil penelitian menunjukan mesikpun menghadapi berbagai tantangan, media massa tetap menjadi elemen vital dalam mendorong demokratisasi di Indonesia dengan meningkatkan partisipasi publik dan transparansi politik. Langkah-langkah untuk memperkuat integritas dan profesionalisme media, serta edukasi media kepada masyarakat, sangat penting untuk memastikan media massa dapat terus berperan sebagai pilar demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Corresponding Author:

Melati
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
melatisjk@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Proses demokratisasi di Indonesia berkembang pesat sejak jatuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998. Reformasi politik telah membuka jalan bagi kebebasan berekspresi dan pers, sehingga memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi lebih aktif dalam kehidupan politik. Media massa memainkan peran penting dalam perubahan ini, menjadi sarana utama penyebaran informasi dan memberikan suara kepada berbagai kelompok sosial. Kebebasan pers yang baru telah memungkinkan media Indonesia untuk memberitakan berbagai isu dengan lebih bebas, mulai dari korupsi hingga pelanggaran hak asasi manusia, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Media massa tidak hanya menjadi alat penyebaran informasi, tetapi juga wadah diskusi publik. Televisi, radio, surat kabar, dan media digital menyediakan platform bagi beragam pandangan dan opini, memperkaya perdebatan publik dan membantu masyarakat lebih memahami permasalahan yang dihadapi negara kita. Dengan cara ini, media massa berkontribusi terhadap pendidikan politik masyarakat dan membantu mereka menjadi pemilih yang lebih bijak dan kritis. Peran ini sangat penting untuk memperkuat fondasi demokrasi, karena demokrasi yang sehat memerlukan masyarakat yang memiliki informasi dan partisipatif.

Namun, media massa di Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan. Persaingan yang ketat antar saluran media yang berbeda sering kali mengarah pada praktik jurnalistik yang tidak etis, seperti menyebarkan berita sensasional dan rumor palsu untuk menarik perhatian publik. Selain itu, kepentingan politik dan ekonomi sering kali mempengaruhi isi berita sehingga membahayakan independensi media. Pengaruh pemilik media yang memiliki koneksi politik atau bisnis tertentu dapat mempengaruhi penyajian berita dan pada akhirnya merusak kepercayaan masyarakat terhadap media. Untuk mengatasi tantangan ini diperlukan langkah nyata untuk memperkuat integritas dan profesionalisme media massa di Indonesia. Regulasi yang ketat dan penegakan kode etik jurnalistik sangat penting bagi media untuk memenuhi perannya sebagai pendukung demokrasi. Edukasi media kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan agar mereka bisa lebih kritis dalam menyaring informasi yang mereka terima.

Penelitian ini memiliki beberapa batasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini lebih banyak menggunakan data sekunder dari berbagai sumber literatur dan laporan, sehingga mungkin terdapat keterbatasan dalam mendapatkan informasi yang paling terbaru atau mendalam mengenai situasi terkini media massa di Indonesia. Kedua, penelitian ini tidak menyertakan data empirik dari lapangan yang dapat memberikan perspektif lebih lengkap dan langsung dari praktisi media dan masyarakat. Terlepas dari batasan tersebut, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menganalisis peran media massa dalam konteks demokratisasi Indonesia pasca-Orde Baru serta tantangan dan upaya untuk meningkatkan kualitas dan independensi media. Keterbaruan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap dinamika terkini dan upaya regulasi yang diperlukan untuk memperkuat media sebagai pilar demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Jurnal ini menjelaskan lebih lanjut peran media massa dalam proses demokratisasi di Indonesia serta tantangan dan upaya meningkatkan kualitas dan independensi media yang mendukung demokrasi berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode studi literatur dan menganalisis data deskriptif. Metode penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat interpretatif yang mempelajari fenomena atau kasus tertentu, mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur, dan menggunakan instrumen analisis untuk mengevaluasi temuan yang telah ada. Metode ini digunakan untuk menganalisis data kualitatif sebagai tujuan.

Metode studi literatur adalah metode penelitian yang menggunakan sumber-sumber tertulis sebagai alat pengumpulan data (Febriani et al., 2023). Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi dari berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ilmiah, proses pengumpulan dan analisis data sosial sangat sistematis dan mendetail, dan literatur digunakan sebagai alat utama untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber yang dianggap mewakili pandangan dan temuan yang relevan dalam populasi ilmiah tertentu.

2.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi dan memilih literatur yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan, dan dokumen resmi. Sumber-sumber ini dipilih berdasarkan kriteria relevansi, kredibilitas, dan keterkinian. Dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian dikumpulkan dan diorganisir, serta catatan dan ringkasan dari setiap dokumen dibuat untuk mempermudah analisis. Evaluasi sumber dilakukan untuk menilai kredibilitas dan validitas setiap sumber literatur yang dikumpulkan, memastikan bahwa sumber-sumber yang digunakan dapat dipercaya dan mewakili pandangan yang sahih dalam populasi ilmiah tertentu.

2.2 Analisis Data

Analisis tematik dilakukan untuk mengidentifikasi pola-pola dan hubungan antar tema, menggunakan teknik analisis naratif untuk menggali makna mendalam dari data yang dikumpulkan. ata diinterpretasikan dalam konteks teoritis yang relevan, seperti teori demokratisasi, teori media, dan teori komunikasi politik, untuk menyusun narasi yang menjelaskan bagaimana media massa berkontribusi pada proses demokratisasi di Indonesia dan bagaimana regulasi baru mempengaruhi kebebasan dan integritas media. Kesimpulan dan rekomendasi disusun berdasarkan temuan-temuan yang dianalisis, dengan memberikan rekomendasi untuk memperkuat peran media massa dalam mendukung demokratisasi dan langkah-langkah untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme media di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Demokratisasi

Demokratisasi dapat dipahami melalui dua pendekatan: etimologis dan terminologis. Secara etimologis, kata "demokrasi" berasal dari dua istilah Yunani: "cratein" atau "cratos", yang berarti kekuasaan atau kedaulatan, dan "demos", yang berarti rakyat atau penduduk suatu wilayah. Oleh karena itu, secara literal, demokrasi, juga disebut demos-cratein atau demos-cratos, adalah kondisi di mana rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan. Dalam hal ini, demokrasi mencakup pilihan rakyat, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan rakyat (Poti, 2011).

Arifulloh (2015) menyatakan bahwa ada dua pengertian demokrasi: normatif (demokrasi normatif) dan empiris (demokrasi empiris). Demokrasi empiris adalah demokrasi yang sudah menjadi kenyataan dalam dunia politik (Harahap, 2020), sedangkan demokrasi normatif adalah jenis demokrasi yang seharusnya diterapkan oleh negara secara ideal. Demokrasi empiris dianggap dapat diterima oleh masyarakat karena sesuai dengan kebiasaan masyarakat (Poti, 2011).

Kartini (2020) menguraikan pandangan David Held tentang demokrasi dalam arti luas. Held memadukan pandangan liberal dengan pemahaman tradisi Marxis untuk mencapai makna demokrasi yang menjunjung tinggi prinsip dasar pemerintahan sendiri. Penerapan prinsip ini, yang disebut Held sebagai otonomi demokratis, memerlukan akuntabilitas pemerintah tingkat tinggi dan reorganisasi masyarakat sipil. Otonomi demokratis memberikan partisipasi langsung yang signifikan dalam lembaga-lembaga sosial dan pengelolaan mandiri perusahaan-perusahaan publik. Selain hak untuk memilih, otonomi demokratis juga mencakup Piagam Hak-Hak Fundamental yang memberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, memungkinkan warga negara mengetahui preferensi pribadi mereka, dan pada akhirnya mengontrol agenda politik mereka. Hal ini juga mencakup hak-hak sosial dan ekonomi untuk menjamin kecukupan sumber daya. Tanpa hak-hak ekonomi dan sosial yang kuat, maka hak-hak yang terkait dengan negara tidak dapat terwujud sepenuhnya. Dan tanpa hak-hak negara, bentuk-bentuk baru ketidaksetaraan dalam hal kekuasaan, kekayaan, dan status akan muncul. Pemahaman yang sempit ini secara sistematis menghalangi terwujudnya kebebasan sosial dan ekonomi.

Schumpeter mengusulkan pemahaman yang sangat luas tentang demokrasi. Perdebatan mengenai apa itu demokrasi dan bagaimana seharusnya demokrasi terus berlangsung. Perspektif mengenai demokrasi ini membantu kita memahami bahwa demokrasi adalah suatu entitas yang dinamis, bahwa terdapat banyak definisi yang berbeda mengenai demokrasi, dan bahwa definisi-definisi tersebut terus diperdebatkan (Sholikin, 2021). Metode ini juga membantu menyoroti kemungkinan untuk memfokuskan pada berbagai aspek demokrasi ketika membentuk pemahaman tentang demokrasi. Misalnya, situasi di banyak negara berkembang telah memfasilitasi penerapan hak-hak ekonomi mendasar dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi.

Held menekankan bahwa dalam sistem demokrasi, penting bagi masyarakat untuk memanfaatkan hak-hak dasar seperti kebebasan berbicara, berkomunikasi, berkumpul, dan berorganisasi, yang diperlukan untuk debat politik dan kampanye pemilu. Definisi sempit demokrasi adalah metode politik sederhana, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik (Riady & Lestari, 2021). Warga negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu dari para pemimpin politik yang bersaing mendapatkan suara. Di antara pemilihan, keputusan dibuat oleh para politisi. Pada pemilihan berikutnya, warga negara dapat mengganti perwakilan yang mereka pilih sebelumnya. Kemampuan untuk memilih di antara para pemimpin politik selama pemilihan itulah yang disebut demokrasi. Metode demokratis adalah pengaturan kelembagaan untuk mencapai keputusan politik di mana individu memperoleh kekuasaan untuk mengambil keputusan melalui perjuangan kompetitif untuk mendapatkan suara.

3.2 Media Massa

Istilah "media" berasal dari bahasa Latin (tunggal: media-ii) dan berarti "sesuatu di antara". Ini juga berarti sesuatu yang “ditampilkan secara publik”, “milik umum”, atau “dikomunikasikan” di ruang atau tempat publik. Oleh karena itu, sifat media tidak dapat dipisahkan dari permasalahan yang sering muncul antara ranah publik dan privat. Media menjadi perantara antara kedua dunia ini, menemukan kemungkinan

(atau ketidakmungkinan) hidup berdampingan. Media massa adalah media komunikasi massa yang berperan sebagai pembawa dan agen perubahan, dalam lingkungan masyarakat yang dapat dan mungkin dipengaruhi oleh masyarakat melalui pesan-pesan berupa informasi, hiburan dan pendidikan (Hajad, 2018). Pesan-pesan yang disampaikan kepada publik harus dapat diakses secara luas. Dalam dunia yang mengglobal seperti sekarang ini, peran media massa dalam kehidupan sehari- hari tidak dapat dihindari. Mengingat posisi media massa dalam kehidupan masyarakat sangat penting, maka hanya dengan perkembangan media massa dan kelangsungan hidup era media massa, media massa akan berhasil memainkan peran sebagai komunikator dan pengelola media cetak dan elektroniknya dengan menawarkan lebih banyak saluran, bisnis, situs web, dan program. Tanpa adanya orang yang menggunakan atau memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari, media bagaimanapun juga, media massa ditentukan oleh jumlah pemirsa (Ingratubun, 2021).

Kebebasan media massa atau pers harus diarahkan agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan khalayaknya, terdapat 3 perspektif dalam melihat peran media massa dalam kehidupan sosial, antara lain:

1) Memandang media massa sebagai jendela peristiwa dan pengalaman. Media dapat dilihat sebagai jendela yang memungkinkan orang untuk melihat apa yang sedang terjadi, atau media adalah alat informasi untuk mencari informasi tentang suatu peristiwa.
2) Memandang media massa sebagai filter atau penjaga gerbang yang memilih apa yang perlu diperhatikan dan apa yang diabaikan. Televisi selalu memilih topik, informasi, dan konten lainnya sesuai dengan standar penanggung jawabnya.
3) Melihat media massa sebagai forum di mana Anda dapat menyajikan informasi dan ide kepada publik serta mendapatkan reaksi dan umpan balik.

Menurut McQuail (2010) peran media tidak jauh berbeda dengan peran media massa itu sendiri, dan perspektif yang memandang peran media pada hakikatnya menunjukkan bahwa peran media dalam kehidupan sosial tidak sekedar bersifat instrumental tujuan. Dari pada hiburan atau menghilangkan ketegangan, konten dan informasi yang disajikan memainkan peran penting dalam proses sosial. Dalam konteks politik, media massa dapat memberikan pendidikan politik, menyadarkan masyarakat akan hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, serta memungkinkan masyarakat mengetahui lebih banyak tentang pemimpin, calon presiden, dan calon wakil presiden melalui debat yang disiarkan (Khotimah, 2018).

Media sosial juga berfungsi sebagai ruang demokrasi. Melalui media sosial, pengguna dapat menyampaikan aspirasi, opini, dan pemikiran mereka sebagai bentuk partisipasi demokratis (Khumairoh, 2021). Platform-platform yang tersedia memungkinkan media sosial untuk menciptakan suasana atau tingkat interaksi baru di kalangan penggunanya, menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi publik melalui internet. Hal ini bukan hanya sebagai bentuk penceritaan diri, tetapi juga sebagai alat untuk interaksi kritis seperti mengkritik kebijakan pemerintah, serta mengorganisir atau memobilisasi masyarakat dari ruang online ke offline.

Kekuatan media sosial mampu mengubah pola-pola tradisional dalam proses demokratisasi. Tidak perlu sebuah isu harus melibatkan banyak orang dalam bentuk aksi massa fisik; seorang pengguna media sosial juga dapat memainkan peran penting. Suara individu menjadi signifikan karena apa yang disampaikan mampu menarik minat pengguna lain dalam jaringan pertemanannya. Isu yang muncul dan menjadi topik penting di ruang publik memiliki kesempatan untuk menjadi viral dan menyebar secara luas melalui akun-akun media sosial (Alamsyah, 2021).

3.3 Peran Demokratisasi Media Massa di Indonesia

Untuk memahami peran media massa dalam proses demokratisasi di Indonesia, pertama-tama perlu kita telaah sejauh mana proses penyebaran informasi telah berkembang. Pada awalnya, revolusi komunikasi di Indonesia hanya menyentuh kalangan media. Kemajuan di bidang media komunikasi mengalami percepatan luar biasa di akhir masa pemerintahan Orde Baru.

Namun, saat itu kemajuan tersebut belum diimbangi oleh perkembangan di bidang sumber komunikasi dan audiens. Pada tahun 1990-an, kita sudah memiliki berbagai sarana media modern, mulai dari antena parabola, telekonferensi, faksimile, SKSD Palapa, hingga pencetakan jarak jauh. Namun di sisi lain, sumber berita dan informasi yang ada masih terbatas, dan hingga akhir tahun 1990-an belum banyak mengalami perubahan signifikan. Secara global, sumber informasi kita masih banyak berasal dari liputan kantor berita besar (Reuter, UPI, AFP, dan AP). Secara nasional, sumber informasi masih dikuasai oleh elit, pemerintah, atau mereka yang memiliki akses ke media massa. Akibatnya, masyarakat umum saat itu masih banyak yang tidak atau belum memiliki kesempatan untuk menggunakan media dan mengemukakan opininya. Khalayak umum lebih banyak berperan sebagai "penonton setia" dengan segala konsekuensinya, daripada pemain yang menentukan. Sementara itu, pada komponen khalayak masih terdapat keterbatasan tertentu. Hingga tahun 1996, surat kabar di Indonesia hanya mencapai sekitar 12 juta eksemplar, sangat sedikit dibanding jumlah penduduk yang 165 juta. Itu pun banyak terkonsentrasi di kota-kota besar. Selain itu, sebagian besar masyarakat masih belum terbiasa membaca atau mencari informasi dari media massa. Demikian pula,

wilayah blankspot media televisi juga masih sangat luas, terlebih lagi pemilikan parabola masih terbatas pada kalangan atas di perkotaan. Kondisi ini tentu jauh dari tuntutan berbagi informasi dalam konteks komunikasi. Informasi tidak hanya belum tersebar secara merata, tetapi proses komunikasinya pun masih didominasi oleh struktur sosial tertentu yang memiliki akses ke media massa. Akibatnya, khalayak komunikasi politik terbagi dalam struktur yang timpang.

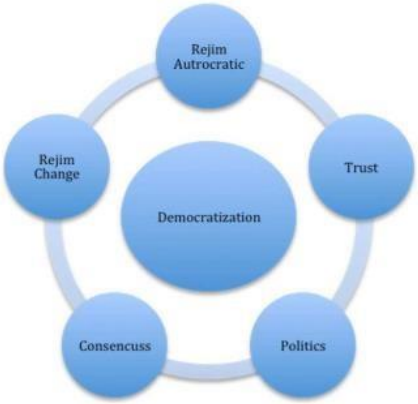
Jumlah attentive public, yakni khalayak yang memiliki perhatian kontinu terhadap urusan pemerintahan atau masalah politik dan pemerintahan, sangat sedikit saat itu. Khalayak lebih banyak berperan sebagai general public, yang kurang memiliki pengetahuan tentang urusan pemerintahan, jarang berkomunikasi dengan pembuat kebijakan, tidak berperhatian, atau bahkan cenderung pasif. Kultur attentive stratum, istilah yang digunakan Almond dan Verba (1963) untuk menggambarkan subkultur yang memungkinkan berkembangnya kelompok masyarakat yang tertarik pada kebijakan umum dan melakukan diskusi sosial tentang berbagai isu politik, masih sangat sedikit jumlahnya. Sementara itu, kalangan yang lebih banyak terlibat dalam proses komunikasi politik di Indonesia masih terbatas pada elite the leadership public. Meskipun pada awal 1990-an sudah sering muncul demonstrasi atau gerakan massa yang berbondong-bondong ke DPR di Jakarta, gerakan itu biasanya masih berkisar pada masalah kepentingan yang secara langsung merugikan aspek materi atau kehidupan mereka, dan itu pun terbatas pada kalangan yang benar-benar terlibat dalam permasalahan tersebut.

Padahal, adanya khalayak yang memiliki perhatian terhadap perkembangan politik, memiliki informasi mengenai perkembangan tersebut, dan mau aktif, sangat penting. berpartisipasi merupakan kebutuhan suatu sistem politik yang demokratis. Menurut pandangan aktivis-rasionalitas (rationality-activist) dari Almond dan Coleman (1963) dalam Welch (2016), suatu demokrasi yang berhasil memerlukan partisipasi aktif warga negara dalam politik, akses dan pemahaman akan informasi politik, serta memiliki pengaruh dan kurangnya publik yang peduli bisa jadi bukan hanya disebabkan oleh kurangnya informasi pada masyarakat, tetapi juga karena adanya kendala kontrol. Ini menunjukkan bahwa proses demokratisasi tidak hanya tergantung pada informasi dan peran media massa. Sebuah sistem demokratis membutuhkan kemampuan demokratisasi pada warganya. Artinya, warga negara perlu memiliki kemampuan tertentu dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi, sehingga mereka dapat berfungsi dengan baik sebagai bagian dari sistem demokrasi tersebut. Contohnya, kemampuan untuk menghargai hak- hak orang lain, menghormati ide dan pandangan orang lain, tidak memaksakan kehendak sendiri, dan lain sebagainya.

Tanpa kemampuan semacam itu, bahkan jika elit penguasa bersedia untuk melemahkan kekuasaan, dikhawatirkan akan muncul fragmentasi, meningkatnya semangat kelompok-kelompok primordial, dan peningkatan konflik dan permusuhan, seperti yang terjadi di India dan Filipina. Di negara-negara tersebut, demokrasi sering kali menyebabkan konflik dan pertentangan, perselisihan rasial, hingga pertikaian bersenjata dan kekerasan. Dua tahun setelah kemenangan Clinton di Gedung Putih, akhirnya harapan tentang demokratisasi itu pun terjadi juga di Indonesia. Tahun 1998 gerakan demokratisasi pun bergulir di sini dengan tuntutan reformasi politik (Gunaryono, 2009). Saat itu bermula dengan terjadinya krisis ekonomi, yang menghancurkan legitimasi pemerintah Orde Baru, Akhirnya kita pun mafhum, Memang, demokrasi sering kali dianggap sebagai impian yang indah. Namun, seperti sebuah tanaman, demokrasi membutuhkan tanah dan pupuk yang sesuai. Jika tidak, pertumbuhannya bisa berbeda dengan yang diharapkan. Tanaman demokrasi bisa tumbuh tanpa semangat dan tidak memberikan hasil yang memuaskan, tetapi juga bisa tumbuh liar dan menyebabkan ketidakstabilan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menyiapkan lingkungan yang sesuai dan memberikan dukungan yang dibutuhkan untuk memperkuat fondasi demokrasi.

3.4 Tantangan media massa

Proses demokratisasi dalam rezim yang berkuasa itu merujuk pada perubahan atau transformasi dalam suatu negara yang bertujuan untuk mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi. Ini berarti bahwa rezim yang sebelumnya mungkin bersifat otoriter atau memiliki kontrol yang ketat mulai membuka ruang bagi partisipasi publik, transparansi, pemilihan umum yang bebas dan adil, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Proses ini melibatkan reformasi politik, hukum, dan sosial untuk memastikan bahwa kekuasaan pemerintah lebih akuntabel kepada rakyat dan bahwa rakyat memiliki suara nyata dalam pengambilan keputusan politik, dibawah ini adalah contoh gambaran grafik proses demokrasi dalam rezim yang berkuasa (Poti & Ahmad, 2021):



Gambar 1. Proses demokratisasi pada rezim yang berkuasa

Salah satu masalah yang sangat penting bagi media dalam demokrasi adalah akurasi berita dan perlindungan sumber informasi. Menurut Lippmann (1992) masalah ini timbul dari harapan bahwa media (pers) dapat menyelaraskan atau memperbaiki kelemahan teori demokrasi. Dalam konteks ini, para demokrat menganggap media, atau surat kabar, sebagai "obat mujarab" untuk kekurangan yang mereka miliki. Namun, analisis tentang sifat pemberitaan dan dasar ekonomi jurnalisme cenderung menunjukkan bahwa surat kabar selalu mencerminkan ketidaksempurnaan struktur opini publik, baik dalam skala kecil maupun besar juga membahas masalah ini. Media adalah alat efektif untuk propaganda karena peran mereka sebagai perantara antara domain publik dan domain privat. Terlepas dari kenyataan bahwa tujuan media tidak hanya untuk menghasilkan propaganda, tujuan ini merupakan komponen yang sangat penting bagi seluruh layanan media. Menurut Chomsky (2022) "kelompok-kelompok istimewa" yang memiliki kekuatan yang lebih besar daripada kelompok lain dalam masyarakat selalu berisiko memanipulasi dan menggunakan media.

Manipulasi jenis ini jelas mengancam keseimbangan ranah publik. Pihak yang lebih kuat mendapatkan banyak keuntungan, tetapi pihak yang lebih lemah kehilangan hak istimewa mereka sebagai kelompok yang aktif berpartisipasi dalam urusan publik. Karena tujuan utama Manipulasi ini bertujuan untuk mempertahankan dominasi kekuasaan dalam masyarakat dan membiarkan kepentingan masyarakat, terutama yang lemah dan terpinggirkan, diabaikan. masalah ini dengan mengubah kembali konsep "media sebagai pesan", yang menyoroti pentingnya keterlibatan publik dalam mengatur media. Levinson menegaskan bahwa penting bagi publik untuk mengenali implikasi sosial dari media, bukan hanya menginterpretasikan pesan yang disampaikan.

Redefinisi ini sangat penting untuk memahami hubungan antara media dan masyarakat karena seringkali khalayak terpaku pada konten tanpa mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas (seperti sinetron) tetapi mengabaikan elemen-elemen struktural yang terkait dengannya (seperti obsesi ilusi terhadap gaya hidup urban). Padahal, hal ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap berbagai aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya. kemajuan media telah mengubah masyarakat kita menjadi masyarakat yang sangat "haus informasi." Media sebagai perantara yang "mengeksplorasi kemungkinan (atau kemustahilan) akan hidup bersama" atau menjaga kepentingan masyarakat. Namun, karena terjadi pergeseran pelaku di wilayah Keterlibatan aktif warga di ruang publik kian terancam, dari warga sipil hingga segelintir kelompok kuat, menurut Center for Innovation Policy and Governance Media and Democracy. Tidak ayal, kondisi seperti ini membuat sekelompok orang menjadi semakin tidak berdaya. Kemungkinan hidup bersama dapat dengan cepat hilang, terutama bagi mereka yang berbeda, terpinggirkan, dan minoritas. Industri media, yang digerakkan oleh motif keuntungan dan sistem rating, telah bergerak ke arah "perusakan" karakter publik. Setelah mendapatkan beberapa pemahaman dasar tentang peran media dalam masyarakat, menjadi jelas bahwa tujuan ekonomi dan politik mempengaruhi kinerja media. Oleh karena itu, penting untuk memahami ekonomi politik untuk memahami bagaimana relasi kekuasaan dan motif ekonomi mempengaruhi media (Sugiono, 2020).

Secara substantif, kebebasan pers yang sudah dinikmat masyarakat, tetap berpotensi menimbulkan konflik antara media lokal dengan pemerintah daerah maupun masyarakat lokal. Ini disebabkan institusi pemerintah masih mempo-sisikan sebagai pengendali informasi. Media lokal berupaya menjalankan fungsi keterbukaan dan profesionalisme dalam pemberitaan (Susanto, 2020).

3.5 Pelaksanaan demokrasi di media massa dalam pemilu 2019

Pemilihan Presiden Indonesia tahun 2019 menghadapi paradoks yang unik. Di satu sisi, platform kebijakan kedua calon hampir tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Alih- alih memberikan kritik terhadap Presiden Joko Widodo, kampanye dari calon oposisi Prabowo Subianto relatif pasif dan minim.

Mayoritas orang Indonesia menganggap debat presiden yang disiarkan di televisi membosankan. Baik jurnalis lokal maupun asing menyatakan bahwa tidak ada yang menarik untuk ditonton selama kampanye. Para kandidat presiden dan wakil presiden tidak menyuguhkan perdebatan yang jelas mengenai arah masa depan negara.

Mengamati bagaimana media massa online mengubah realitas offline adalah salah satu cara untuk menjawab pertanyaan ini. Mungkin tidak ada kampanye politik yang memecah belah atau mempolarisasi di Indonesia, tapi percakapan di media sosial membuat orang Indonesia merasa bahwa ada lebih banyak polarisasi daripada yang sebenarnya terjadi, dan para politisi terus- menerus memperkuat persepsi ini, yang dapat mengganggu perdamaian. Para ahli di Indonesia telah memperingatkan bahwa kurangnya literasi dapat menyebabkan konflik di media sosial.

Seringkali polarisasi di media sosial di Indonesia dibandingkan dengan yang terjadi di Amerika Serikat.Oleh karena itu, dalam bahasa Indonesia: "Jika mereka turun, kita turun". Polarisasi: Apa itu? Temuan jajak pendapat tidak berubah, meskipun ada Kekhawatiran tentang potensi perpecahan, disinformasi, dan berita palsu masih ada.Meskipun demikian, Jokowi tetap memimpin dengan tingkat elektabilitas sekitar 57%, unggul atas Prabowo yang hanya mencapai 32%. Hal ini menunjukkan bahwa hasil survei sampai saat ini belum banyak dipengaruhi oleh konten yang beredar di internet atau media sosial. Mayoritas dari konflik yang terjadi di ranah maya adalah hasil dari aksi pasukan siber dari kedua kubu dan belum mencapai tingkat "darurat hoax".Sementara itu, anak muda Indonesia beralih ke platform yang lebih apolitis karena mereka semakin menghindar dari diskusi politik yang rumit, terutama di Twitter dan Facebook (Kholisoh, 2020).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Media massa memiliki peran krusial dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat., memfasilitasi dialog dan diskusi publik, serta memperkuat akuntabilitas pemerintah. Namun, ada beberapa tantangan yang dihadapi, termasuk ketergantungan pada kepentingan politik dan ekonomi serta risiko manipulasi informasi. Pada Pemilu 2019, misalnya, media massa memainkan peran penting dalam memberikan informasi kepada para pemilih, tetapi ada juga tantangan dalam memastikan bahwa informasi yang disajikan objektif dan akurat. Namun demikian, kesimpulannya adalah bahwa media massa tetap menjadi elemen penting dalam mendorong demokratisasi di Indonesia dengan meningkatkan partisipasi publik dan memastikan transparansi dalam proses politik.

4.2 Saran

Diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat kebebasan pers dan melindungi integritas jurnalistik dari tekanan politik dan ekonomi. Kedua, pendidikan masyarakat tentang literasi media dan kritisisme informasi harus ditingkatkan untuk menghadapi fenomena penyebaran berita palsu dan disinformasi. Ketiga, perlu adanya regulasi yang efektif dalam mengatur media sosial untuk mencegah penyebaran konten yang merugikan dan mempromosikan dialog yang sehat di ruang publik. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa media massa, baik konvensional maupun digital, dapat berperan lebih efektif dalam memperkuat proses demokratisasi di Indonesia dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik negara.

REFERENSI

Alamsyah, A. (2021). Model Komunikasi Jejaring Sosial dan Media Massa dalam Konteks Pesan Publik: Model Komunikasi Jejaring Sosial dan Media Massa dalam Konteks Pesan Publik. DIALEKTIKA KOMUNIKA: Jurnal Kajian Komunikasi dan Pembangunan Daerah, 9(1), 12-27.

Arifulloh, A. (2015). Pelaksanaan pilkada serentak yang demokratis, damai dan bermartabat. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, *3*(3), 301-311.

Almond, G. A., & Verba, S. (1963). The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations.

Chomsky, N. (2022). *Politik Kuasa Media*. Jalan Baru Publisher.

Febriani, E. S., Arobiah, D., Apriyani, A., Ramdhani, E., & Millah, A. S. (2023). Analisis data dalam penelitian tindakan kelas. *Jurnal Kreativitas Mahasiswa*, *1*(2), 140-153.

Gunaryono, N. (2009). *Kedudukan, Peran Dan Fungsi Tni Dalam Ketatanegaraan Ditinjau Dari Uu No. 34 Tahun 2004 Tentang Tni* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA).

Hajad, V. (2018). MEDIA DAN POLITIK (Mencari Independensi Media Dalam Pemberitaan Politik). *SOURCE: Jurnal Ilmu Komunikasi*, *2*(2).

Harahap, S. (2020). DEMOKRASI DITINJAU PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IAH. *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam*, *3*(1), 65-80.

Ingratubun, A. (2021). Strategi Programming Acquisition dalam Kelancaran Operasional Penyiaran Program Televisi. *Jurnal signal*, *9*(1), 25-49.

Kartini, D. S. (2020). Retrospeksi Konsepsi Demokrasi Pancasila Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, *14*(1), 150-160.

Kholisoh, M., Nurkhaeni, T., Ningrum, P, S., Fitriani, I. (2020). Peran Media Sosial Dalam Demokratisasi Masa Kini. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Tidar Magelang.

Khotimah, H. (2018). POSISI DAN PERAN MEDIA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT. Jurnal UIN Mataram , volume 16, No. 1.

Khumairoh, U. (2021). Dampak konglomerasi media terhadap industri media massa dan demokrasi ekonomi politik di era konvergensi media. *Muqoddima Jurnal Pemikiran Dan Riset Sosiologi*, *2*(1), 63-78.

Lippmann, W. (1922). The world outside and the pictures in our heads. *Public opinion*.

McQuail, D. (2010). *McQuail's mass communication theory*. Sage publications.

Poti, J., & Ahmad, M. K. (2021). Mass Media Reform and Democratization in the Indonesian Context. *Social Sciences*, *10*(1), 28-35.

Poti, J. (2011). Demokratisasi media massa dalam prinsip kebebasan. Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, 1(1), 17-29.

Riady, Y., & Lestari, I. S. P. (2021). Kualitas Informasi, Transparansi, dan Akuntabilitas Penggunaan Dana Hibah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, *14*(02), 20-26.

Sholikin, A. (2021). Kajian Model Demokrasi: Teori dan Paradigma. *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, *13*(02), 168-184.

Sugiono, S. (2020). Fenomena Industri Buzzer di Indonesia: Sebuah Kajian Ekonomi Politik Media. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, *4*(1), 47-66.

Susanto, E. H. (2020). Dinamika Media Massa Lokal dalam Membangun Demokratisasi di Daerah. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, *9*(2), 117-127.

Syaipudin, L. Peran komunikasi massa di tengah pandemi COVID-19. *Kalijaga Journal of Communication* 2.1 (2020), 14-34.

Welch, S. (2016). *The concept of political culture*. Springer.